

KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Wahyu Hamidi, Rahmita B. Ningsih, dan Mayang Sari

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

PENDAHULUAN

Provinsi Riau memiliki keunggulan komparatif karena letaknya yang strategis. *Pertama*, Riau dekat dengan negara-negara ASEAN, terutama Singapore, Malaysia dan Thailand. *Kedua*, Riau terletak di rute perdagangan dan pelayaran internasional di Asia-Pasifik. *Ketiga*, lokasi Riau dekat dengan Singapore yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. *Keempat*, Riau terletak di tengah Pulau Sumatera, dilewati lintas Barat dan lintas Timur.

Selain letaknya yang strategis, Riau selama ini dikenal sebagai provinsi yang kaya dengan sumberdaya alam. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau adalah sumberdaya perikanan baik darat (air tawar) maupun laut. Sub sektor perikanan ini terus ditumbuh kembangkan dengan sasaran pembangunan diantaranya; konsumsi ikan dalam negeri, memperoleh devisa dengan cara ekspor hasil tangkapan, menyediakan bahan baku perikanan, kesejahteraan nelayan dan menyerap tenaga kerja. Berkembangnya sub sektor ini berdampak pada peningkatan perekonomian daerah..

Peranan sektor perikanan cukup penting dalam perekonomian di Provinsi Riau. Pada tahun 2004 sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,06% terhadap PDRB Provinsi Riau, pada tahun 2005 kontribusinya 2,00%, kemudian 1,95% untuk tahun 2006, serta tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 1,81% dan 1,68%. Sektor perikanan merupakan pemberi kontribusi kelima pada sektor pertanian, setelah sub sektor tanaman bahan makan, tanaman perkebunan, perternakan dan hasil-hasilnya serta kehutanan. Adapun PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku di Provinsi Riau untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp.114.246.373,66, tahun 2005 sebesar Rp. 139.018.996,15, kemudian untuk tahun 2006 sebesar Rp.167.068.188,88, tahun 2007 sebesar Rp.210.002.560,30 dan untuk tahun 2008 yaitu sebesar Rp.276.400.129,95.

Sedangkan PDBR Provinsi Riau atas harga konstan 2000, untuk lima tahun yaitu tahun 2004 sampai 2008 adalah sebagai berikut : tahun 2004 adalah sebesar Rp.75.216.719,28, kemudian tahun 2005 Rp. 9.287.586,75, untuk tahun 2006 yaitu Rp.83.370.867,24, tahun 2007 Rp.86.213.259,49 dan pada tahun 2008 sebesar Rp.91.085.381.

Bila dilihat dari kondisi perairan Provinsi Riau, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan dapat dikembangkan menjadi budidaya perikanan laut dan perikanan air tawar. Untuk budidaya perikanan laut tentu saja kabupaten/kota yang mempunyai laut yang bisa melaksanakannya, seperti Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Sedangkan budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar dan Rokan Hulu. Ada beberapa kabupaten yang sudah maju budidaya perikananannya, seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Bengkalis. Terdapat bermacam-macam sistem pembudidayaannya, seperti menggunakan jaring apung dan lain-lain. Namun bagi kabupaten yang tidak memiliki laut, kolam merupakan alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.

Pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Riau diharapkan dapat mendukung peningkatan

produksi perikanan sehingga secara tidak langsung akan menaikkan kesejahteraan yang tercermin dari pendapatan rumah tangga perikanan pertahun. Dengan bertambahnya sarana dan prasarana perikanan, maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dan nilai produksi perikanan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian Provinsi Riau. Dari semua sektor, perikanan harus menjadi sektor unggulan untuk jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. Sejak dulu kini dan masa datang, sektor perikanan sangat mudah dieksploitasi karena banyak jenis ikan termasuk udang, kepiting kerang dan plankton-plankton yang tersedia karena kebesaran dan kemahakuasaan Allah Sang Pencipta, dan justru telah menjadi sumber protein bahkan sumber kehidupan ekonomi masyarakat nelayan (pantai). Karena itulah, sektor strategis ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk lebih dikembangkan secara profesional bagi kebutuhan dan kelangsungan hidup rakyat banyak dan bagi kebutuhan ekspor untuk mendatangkan devisa (**Pieris, 2001: 8**).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : seberapa besar kontribusi sektor perikanan dalam peningkatan perekonomian Provinsi Riau.

Untuk mengetahui kontribusi dan perkembangan subsektor perikanan dalam peningkatan Perekonomian Provinsi Riau.

Menurut **Suparmoko (2008: 11)** sumber daya alam diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di bumi maupun diatas bumi yang dihasilkan oleh alam dan bukan oleh manusia, maka produksi barang dan jasa itu tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan sumber daya alam di dalam proses produksi mereka. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, berarti semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.

Sudanroko dan Muliawan (2009: 106), sumber daya alam mencakup semua yang diberikan oleh alam baik yang bersifat hidup maupun tak hidup yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam tingkatan teknologi, kebudayaan, kondisi ekonomi, serta kurun waktu tertentu.

Pertanian adalah salah satu bidang produksi dan lapangan usaha yang paling tua di dunia yang pernah dan sedang dilakukan oleh masyarakat. Sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian diantaranya mencakup, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan (**Putong, 2003: 70**).

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat (**Rahim, 2007: 158**).

Pertanian Indonesia tidak hanya terdiri dari sub-sektor pertanian dan sub-sektor pangan, tetapi juga sub-sektor perkebunan, sub-sektor perternakan dan sub-sektor perikanan. Sub-sektor perkebunan merupakan sub-sektor pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa Negara. Sub-sektor perikanan memiliki jenis yang cukup bervariasi. (**Soetrisno, 2002: 12**) Berdasarkan cara melakukannya paling sedikit terdapat dua jenis usaha perikanan darat, yaitu tambak dan kolam ikan. Disamping dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri, hasil sub-sektor perikanan juga dimanfaatkan untuk keperluan ekspor.

Perikanan merupakan sub sektor yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Masalah efisiensi dikaitkan dengan jumlah

persediaan (stock) ikan yang terus terancam punah dan masalah distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Namun demikian subsektor ini di negara-negara berkembang belum mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, perbaikan gizi rakyat dan peningkatan ekspor serta memanfaatkan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (Z.E.E) **(Suparmoko, 2008: 183)**.

Sub sektor perikanan yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun yang di air asin. Komoditas perikanan antara lain seperti ikan Tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan Mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan Bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya. **(BPS Provinsi Riau, 2009: 11)**

Sektor perikanan memberikan harapan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Perikanan merupakan satu bagian dari kegiatan ekonomi yang memberikan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui berbagai usaha yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan,

Sub-sektor perikanan (*fishery*) terdiri dari perikanan laut (penangkapan di laut seperti ikan Tuna, Tenggiri serta budidaya di laut, muara dan sungai misalnya tiram dan mutiara) dan perikanan darat (penangkapan di perairan umum, yaitu di sungai, waduk dan rawa), serta budidaya di darat yaitu tambak, kolam, keramba dan sawah **(Rahim, 2007: 18)**.

Budidaya perikanan laut, baik melalui ekstentifikasi, menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting di kawasan pesisir, intensifikasi dilakukan untuk meningkatkan produktifitas berbagai aktifitas budidaya perikanan yang sudah ada, seperti budidaya di tambak, kolam air tawar, dan keramba jaring apung. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pembuatan lahan budidaya baru secara selektif, tentunya dengan cara-cara yang ramah lingkungan, dan revitalisasi budidaya tambak yang tidak dioptimalkan secara krisis **(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004: 68)**.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi **(Putong, 2003: 252)**.

Teori pertumbuhan ekonomi mengandung dua pengertian, pengertian pertama diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pengertian kedua merupakan tujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang **(Sukirno, 2000: 443)**.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang

dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda (**Rahardja, 2001: 177**).

Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber pertumbuhan lainnya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akan naik sebagai akibat mulai membaiknya tingkat pendapatan riil masyarakat (**Basri, 2002: 83**)

Menurut **Todaro dan Smith (2006: 118)** tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi setiap masyarakat adalah, “akumulasi faktor” modal dan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi.

Akumulasi modal, termasuk semua investasi dalam tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Kemajuan teknologi yang secara luas, diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan.

Menurut **Mahyudi, (2004: 2)** Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional (produksi nasional / GDP/ GNP) dalam satu tahun tertentu tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.

(Mankiw, 2004: 257) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah:

Suatu proses yang berarti perubahan terjadi terus menerus, Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang, dan Perbaikan sistem kelembagaan diselenggarakan di bidang (misalnya bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya).

Pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita, berkurangnya atau dihapusnya kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang. (**Todaro, 2000: 132**).

Menurut Todaro paling tidak ada tiga sasaran pokok pembangunan yaitu,

Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang diperlukan untuk bisa hidup seperti makan, sandang dan perumahan, mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai manusiawi dan budaya yang semuanya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata tetapi juga untuk kesadaran akan harga diri baik individual maupun internasional, dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individual dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain tetapi juga dari kebodohan dan penderitaan manusia.

Dari ketiga sasaran pokok pembangunan tersebut diatas, jelaslah bagi kita bahwa tanpa memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat dalam pengertian yang luas maka prospek-prospek kemajuan tidak akan tercapai. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut pada umumnya negara berkembang menghadapi dua kendala baik internal dan eksternal (**World Bank, 2001: 11**).

Menurut Karl Bucher (dalam **Arsyad, 2004: 47**) bahwa perkembangan ekonomi melalui tiga tahap yaitu : (a) Produksi kebutuhan sendiri (subsisten), (b) Perekonomian kota dimana pertukaran sudah mulai luas, (c) Perekonomian nasional dimana peran pedagang jadi semakin penting.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup ekonomi secara regional. Suatu daerah akan memperoleh pendapatan atas hasil produksi dari daerah yang bersangkutan yang disebut dengan PDRB. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut dikenal dengan pendapatan perkapita daerah tersebut (**Todaro, 2004: 77**).

Menurut **Tarigan (2005: 18)**, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah dimana dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor ekonomi dan menjumlahkannya, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sementara menurut **Sukirno (2000: 38)**, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, ataupun merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai rupiah tahun berjalan dari output, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk mengukur total kuantitas output.

Badan Pusat Statistik (2004: 30), pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan yaitu :

- a. Menurut pengertian produksi : suatu jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi yang beroperasi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Menurut pengertian pendapatan : adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- c. Menurut pengertian pengeluaran : adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut **Usman (2000: 116)**, pengertian produksi mengalami perkembangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Menurut aliran Fisiokrat, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang baru (*product nett*).
- 2). Menurut aliran Klasik, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan tidak harus barang baru, tetapi bisa juga barang yang hanya diubah bentuknya.
- 3). Pengertian produksi terus berkembang. Pada akhirnya para ekonom memberikan pengertian produksi sebagai kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah manfaat suatu barang.

Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi (**Putong, 2003: 100**).

Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan yang meningkatkan nilai

kegunaan atau faedah (*utility*) suatu benda. Ini dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kegunaan dengan mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru (*utility of form*). Dapat pula meningkatnya kegunaan suatu benda itu karena adanya kegiatan yang mengakibatkan dapat berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ke tangan orang lain (Salim, 2000: 34).

Selanjutnya menurut (Soekarwati, 2003: 7), produksi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan sebagai volume produksi dan dalam satuan unit-unit.

Hukum Hasil Lebih yang Semakin Berkurang (The Law of Diminshing Return)

Menyatakan bahwa : apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif dan ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun. (Sukirno, 2002 ;196).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu produk barang dan jasa adalah jumlah yang ditawarkan, harga barang, jumlah faktor produksi (input) yang tersedia, keadaan alam, pajak dan teknologi (Rahim, 2007: 28).

Kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi dan selanjutnya akan memperluas pasar serta kegiatan perdagangan (Sukirno, 2007: 147).

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang heterogen sehingga diperlukan adanya perencanaan tenaga kerja (man power planing) secara tepat. Ciri khusus yang dimiliki faktor produksi ini adalah tidak dapat hilang atau berkurang apabila faktor produksi itu dipakai, dimanfaatkan atau dijual. Sehingga nilainya semakin tinggi dan keadaannya tidak berkurang. Tujuan utama faktor produksi ini adalah guna mendapatkan balas jasa yang disebut upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut. Jadi penawaran tenaga kerja tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah, semakin tingginya tingkat upah maka akan mendorong banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja (Tambunan, 2002: 43).

Didalam perusahaan perikanan, masalah tenaga kerja merupakan masalah yang penting karena tenaga kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan. Pentingnya tenaga kerja merupakan asset perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan perusahaan, apalagi kalau perusahaan tersebut kegiatannya produksi/ pabrik. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup.

Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Yang dimaksud tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja dalam pabrik atau suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah dari hasil produktivitasnya yang dilakukannya terhadap perusahaan.

Untuk mencapai suatu tingkat produksi yang memuaskan haruslah ditentukan jumlah tenaga kerja yang paling tepat, karena kekurangan tenaga kerja akan dapat menyebabkan rendahnya produktivitas perusahaan, sebaliknya berlebihan jumlah tenaga kerja akan menimbulkan dampak negatif pula karena biaya produksi akan meningkat.

HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapatlah dibuat hipotesa sebagai berikut : diduga sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Riau, karena sub sektor perikanan di Provinsi Riau cukup memberikan pengaruh terhadap perekonomian Riau.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau meliputi ,Produksi perikanan dan Potensi sumber daya perikanan Provinsi Riau.dan Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, antara lain ,Keadaan geografis daerah penelitian,Jumlah penduduk dan wilayah,PDRB Provinsi Riau dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian (Perikanan) merupakan sektor yang berada pada urutan pertama dalam perhitungan PDRB Provinsi Riau. Adapun perkembangan jumlah produksi perikanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Produksi Perikanan Perkabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Pertahun (Ton)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Kuantan Singingi	1.654,64	1.431,80	1.571,00	1.564,90	3.002,34
2	Indragiri Hulu	821,62	10.812,30	1.305,20	1.598,20	3.158,39
3	Indragiri Hilir	39.259,08	35.123,80	39.259,40	39.459,20	36.386,26
4	Pelalawan	4.422,90	3.277,20	3.712,40	4.076,00	4.454,44

5	Siak	2.997,79	3.695,80	2.557,10	1.711,70	1.942,70
6	Kampar	4.146,10	13.924,50	14.494,10	15.513,00	19.192,91
7	Rokan Hulu	5.026,49	5.058,30	3.308,40	3.355,00	4.302,27
8	Bengkalis	13.940,73	8.302,20	8.562,60	12.704,40	13.642,59
9	Rokan Hilir	78.097,50	58.594,10	55.005,60	54.092,10	42.688,44
10	Pekanbaru	357,50	6.042,20	6.255,10	6.261,10	782,50
11	Dumai	2.075,22	1.656,40	1.832,80	8.568,50	2.608,48
	Jumlah	152.799,6	147.918,6	137.863,7	148.904,1	132.161,3

Sumber : Riau Dalam Angka, 2010

Berdasarkan tabel 1 diatas, secara keseluruhan jumlah produksi perikanan perkabupaten/kota untuk tahun 2004 sebanyak 152.799,6 ton, untuk jumlah produksi perikanan yang paling tinggi memberikan kontribusi adalah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 78.907,50 ton sedangkan yang paling kecil adalah Kota Pekanbaru sebanyak 357,50 ton. Kemudian untuk tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 147.918,6 ton, dilihat berdasarkan kabupaten, yang menghasilkan produksi paling besar adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 58.594,10 ton, sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 1.431,80 ton. Selanjutnya untuk tahun 2006 jumlah produksi mengalami kenaikan menjadi 137.863,7 ton, untuk tahun ini masih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 55.005,60 ton, dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1.305,20 ton.

Pada tahun 2007 jumlah produksi ikan sebesar 148.904,10 ton mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 132.161,3 ton. Berdasarkan kabupaten pada tahun 2007 Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling banyak memproduksi ikan yaitu sebesar 54.092,10 ton dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1.564,90 ton. Untuk tahun 2008 masih Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi produksi ikan paling banyak yaitu sebesar 42.688,44 ton sedangkan yang paling kecil adalah Kota Pekanbaru sebesar 782,50 ton.

Bila dilihat berdasarkan sektor perikanan, jumlah produksi dari tahun 2004-2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Riau tahun 2004 – 2008 (ton)

No	Sektor	Tahun (Ton)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Perikanan Laut	127.186,00	97.191,30	99.188,20	102.090,20	87.919,20
		83,24%	65,97%	71,95%	70,39%	66,52%
2	Perairan Umum	14.713,80	24.693,70	14.173,50	14.335,00	13.977,70
		9,63%	16,76%	10,28%	9,88%	10,58%
3	Tambak	1.468,74	674,5	246	268,2	876,97
		0,96%	0,46%	0,18%	0,18%	0,66%
4	Kolam	9.430,03	24.768,03	24.256,00	28.349,00	29.387,45

	Keramba	6,17%	16,81%	17,59%	19,55%	22,24%
Jumlah		152.798,57	147.327,53	137.863,70	145.042,40	132.161,32

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan produksi perikanan selama 5 tahun terakhir (2004-2008) mengalami fluktuasi tiap tahunnya dimana pada tahun 2004 berjumlah 152.798,57 ton, pada tahun 2005 mengalami penurunan 147.327,53 ton, kemudian pada tahun 2006 menjadi sebesar 137.863,70 ton, akan tetapi pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 145.042,40 ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 132.161,32 ton, ini disebabkan terjadi penurunan yang cukup banyak di sektor perikanan laut, sedangkan di sektor perairan umum, tambak dan kolam keramba cenderung stabil. Untuk kolam keramba tiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang cukup baik, ini dapat dilihat pada tahun 2004 sebesar 9.430,03 ton, kemudian pada tahun 2005 menjadi 24.768,03 ton, selanjutnya pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 24.256,00 ton, tahun 2007 menjadi 28.349,00 ton dan pada tahun 2008 menjadi 29.387,45 ton.

1. Perikanan Laut

Pertumbuhan nilai produksi Perikanan Laut di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Pertumbuhan Nilai Produksi Perikanan Laut di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 (Rp)

No	Tahun	Perikanan Laut	Pertumbuhan
1	2004	2.961.369.959,00	
2	2005	755.848.050,00	-74,48%
3	2006	836.563.430,00	10,68%
4	2007	1.268.943.455,00	51,69%
5	2008	1.373.694.300,00	8,25%
Rata-rata Pertumbuhan			29,02%

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Berdasarkan tabel 3, perkembangan nilai produksi untuk Perikanan Laut di Provinsi Riau rata-rata pertumbuhan Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 pertahunnya adalah sebesar 29,02%. Untuk perikanan laut, nilai produksi pada tahun 2004 sebesar Rp.2.961.369.959,00, kemudian pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.755.848.050,00 (-74,48%), ini dikarenakan karena faktor cuaca yang tidak bagus sehingga nelayan tidak bisa pergi menangkap ikan. Tetapi pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi Rp.836.563.430,00 (10,68%), tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi Rp.1.268.943.455,00 (51,26%) dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp.1.373.694.300,00 (8,25%).

2. Perikanan Umum

Pertumbuhan nilai produksi Perikanan Perairan Umum di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4 : Pertumbuhan Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 (Rp)

No	Tahun	Perairan Umum	Pertumbuhan
1	2004	196.563.725,00	
2	2005	500.320.765,00	154,53%
3	2006	288.385.419,00	-42,36%
4	2007	269.659.061,00	-6,49%
5	2008	341.399.600,00	26,60%
Rata-rata Pertumbuhan			26,46%

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pertumbuhan nilai produksi perairan umum yaitu sebesar Rp.319.265.714 atau 26,46%. Untuk sektor perairan umum tahun 2004 sebesar Rp.196.563.725,00, tahun 2005 naik menjadi sebesar Rp.500.320.765,00 (154,43%). tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.288.385.419,00 (-42,36%), kemudian pada tahun 2007 turun menjadi Rp.269.659.061,00 (-6,49%), dan tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp.341.399.600,00 (26,60%).

3. **Produksi Budidaya**

Pertumbuhan produksi Budidaya di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Pertumbuhan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 (Rp)

No	Tahun	Budidaya (Tambak & Kolam Keramba)	Pertumbuhan
1	2004	44.923.060,00	
2	2005	48.252.576,00	1,07%
3	2006	70.608.750,00	1,46%
4	2007	75.550.362,00	1,06%
5	2008	96.834.860,00	1,28%
Rata-rata Pertumbuhan			1,21%

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Untuk sektor budidaya untuk tahun 2004 dengan nilai produksi sebesar Rp.44.923.060,00, pada tahun

2005 naik menjadi Rp. 48.252.576,00, atau 1,07% selanjutnya tahun 2006 turun menjadi Rp.70.608.750,00 atau 1,46% namun pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi Rp.75.550.362,00, atau 1,28% dan untuk tahun 2008 mengalami kenaikan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir yaitu menjadi Rp.96.834.860,00. Ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan nilai produksi sektor perikanan di Provinsi Riau mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 1,21%. Keadaan ini tentu berdampak semakin meningkatnya perekonomian di Provinsi Riau.

4. Perkembangan Produksi Perikanan Berdasarkan Lapangan Usaha

Keberadaan lapangan usaha cukup penting bagi suatu industri. Hal ini disebabkan karena lapangan usaha dapat menciptakan pekerjaan, dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menjalankan usaha produksi pada suatu industri. Lapangan usaha ini merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan usaha industri baik menyangkut ketersediaannya maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan lapangan usaha. Hal ini karena biaya lapangan usaha tersebut merupakan salah satu komponen biaya produksi yang harus dipertimbangkan secara seksama oleh para investor sebelum menanamkan modalnya. Adapun perkembangan lapangan usaha khususnya Perikanan di Provinsi Riau adalah selama kurun waktu 4 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : Produksi Sektor Perikanan menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008

Tahun	(Rp Jutaan)	Pertumbuhan (%)
2004	2.358.093,94	
2005	2.779.659,20	17,88%
2006	3.259.153,31	17,25%
2007	3.801.898,43	16,65%
2008	4.632.662,20	21,85%
Rata-rata Perkembangan		14,73 %

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa perkembangan lapangan usaha dari sektor perikanan selama 5 tahun terakhir (2004-2008) terus mengalami peningkatan dimana rata-rata tiap tahunnya sebesar 14,73%. Untuk tahun pertama tidak terdapat perkembangan jumlah industri, kemudian pada tahun 2005 terjadi Rp.2.779.659,20 atau mengalami kenaikan sebesar 17,88%, pada tahun 2006 menjadi Rp.3.259.153,31 namun turun berdasarkan persentase kenaikan menjadi sebesar (17,25%). Selanjutnya pada tahun 2007 menjadi Rp.3.801.898,43 juga mengalami penurunan persentase menjadi sebesar (16,55%), kemudian pada tahun 2008 naik menjadi Rp. 4.632.662,20 atau naik sebesar (21,85%).

Dilihat dari perkembangan lapangan usaha yang terus mengalami peningkatan, kondisi ini tentu akan dapat menunjang perekonomian masyarakat dari berbagai sisi yakni lapangan usaha, dengan semakin banyak lapangan usaha yang terus meningkat, tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak, dengan semakin banyak tenaga kerja yang diambil tentu saja akan mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat nantinya.

5. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Riau

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah

perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di Provinsi Riau sektor perikanan itu sendiri. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Berikut dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan PDRB sektor perikanan Provinsi Riau pada 5 tahun terakhir :

Tabel 7 : Perkembangan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB di Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008

Tahun	PDRB Sektor Perikanan (Rp)	PDRB Provinsi Riau (Rp)	Kontribusi (%)
2004	1.156.117,15	30.879.767,77	
2005	1.252.570,40	33.516.541,66	3,74%
2006	1.351.893,87	36.417.633,12	3,71%
2007	1.456.694,87	39.420.760,09	3,70%
2008	1.568.460,61	42.596.93,48	3,68%
Rata-rata Kontribusi			3,71 %

Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka, 2009

Dari tabel 7, dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Riau sektor perikanan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terjadi pertumbuhan rata-rata 3,71%. Pada tahun 2004 PDRB Provinsi Riau sektor perikanan sebesar Rp.1.156.117,15 atau memberikan kontribusi sebesar 3,74%, Selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi Rp.1.252.570,40, akan tetapi mengalami penurunan dari jumlah persentase menjadi sebesar 3,74%. Pada tahun 2006 terjadi peningkatan dari segi jumlah yakni menjadi Rp.1.351.893,87 atau tetapi turun dari segi kontribusi menjadi 3,71%. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.456.694,87 atau naik menjadi 3,70%, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1.568.460,61 dengan pertumbuhan menjadi 3,68%.

Dari rincian tersebut ini menunjukkan bahwa tiap tahunnya sektor perikanan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Provinsi Riau, dimana tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup baik, tentu ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian Provinsi Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan perikanan sub sektor perikanan laut rata-rata pertahun sebesar 29,02%, sub sektor perikanan umum sebesar 26,46% dan sub sektor perikanan budidaya sebesar 26,46%. Sedangkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi RIAU tahun 2004-2008 rata-rata setiap tahunnya 3,71%.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar berupaya untuk meningkatkan masuknya investasi khususnya investasi pada sektor perikanan. Sehingga bisa menekan angka pengangguran dan dapat meningkatkan PDRB Provinsi Riau di sektor perikanan dan mengarahkan pembangunan dan penyediaan serta meningkatkan infrastruktur yang dapat mendorong masuknya investasi seperti listrik, jalan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Indonesia*.

Jakarta.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2009. *Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2004-2008*, PT. Geosys Intipiranti, Pekanbaru.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad 21*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gregory Mankiw. 2004. *Makro Ekonomi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2009. Pekanbaru.
- Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Makro dan Mikro*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardja, Pratama. 2001. *Teori ekonomi Makro*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahim dan Diah Retno. 2007. *Ekonomika Pertanian, Pengantar, Teori dan Kasus*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Salim, Emil, 2000, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Indayu, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradikma Baru Pembangunan Pertanian, Sebuah Tinjauan Sosiologi*. Penerbit Konisius, Jakarta.
- Sudanroko, Djoko dan Muliawan. 2009. *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT.PP.Mardi Mulyo, Jakarta Selatan.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan Teoritis*. BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus, 2002, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia* , PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael & Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.